

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara maritim yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang amat sangat melimpah, kekayaan alam Indonesia seharusnya sudah bisa mengatasi kemiskinan, akan tetapi, kurangnya keahlian dan pemberdayaan terhadap masyarakat membuat pengelolaan sumber daya alam tidak berfungsi dengan semestinya sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak stabil. Indonesia salah satu negara berkembang dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian melalui pemerintah desa sebagai pemerintahan yang terendah, maka kedudukan pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sangat penting untuk menunjang kehidupan.¹

Menurut Stephanie K. Marrus Strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara serta upaya bagaimana agar tujuan tersebut bisa dicapai. Sedangkan Menurut Siagian Strategi merupakan metode atau rencana yang dipilih untuk membawa masa depan yang diharapkan, Misalnya pencapaian tujuan dan solusi untuk masalah.²

Indonesia merupakan sebuah negara luas yang tidak hanya berpusat di Ibu kota semata, melainkan pergerakan perekonomian maupun pengembangan sebagai bentuk perwujudan pencapaian cita-cita negara juga berlangsung pada tingkat desa. Seperti yang kita ketahui bahwa 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia hidup di daerah pedesaan, sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah di kawasan desa. Keberadaan desa juga menentukan keberhasilan pemerintah dalam hal pembangunan baik itu dari tingkat daerah maupun pusat, sehingga dalam hal ini kemajuan suatu desa sangat menentukan kemajuan suatu negara.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dalam hal peningkatan kesejahteraan, pemerintah melakukan upaya dengan membuat suatu kebijakan yang mengarah pada pemberdayaan³

Menurut Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia (Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014, 2014), kepala desa juga bertanggung jawab penuh untuk membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya untuk mencapai perekonomian skala produktif untuk semaksimal mungkin meningkatkan kemakmuran masyarakat desa. Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat yang

¹Agustin, (2018). Strategi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata 45-67.

²Aska.(2023). Strategi Fokus Perusahaan Menurut Michael Porter 1-5.

<https://www.terketik.com/strategi-fokus-perusahaan-menurut-michael-porter>.

³Azis, (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (Jipsk), Vii., 112-125.

perlu dilakukan pemerintah desa dalam hal pembangunan ekonomi adalah pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).⁴ Menurut (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, 2008), usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi bagian penting dari ekonomi Indonesia dan berkembang dengan sangat cepat. Kita dapat melihat keberadaan usaha mikro kecil dan menengah di kalangan penduduk dari pedesaan hingga perkotaan.⁵

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM menjadi tulang punggung ekonomi nasional, terutama saat menghadapi krisis ekonomi, seperti yang terjadi pada tahun 1998. Selain menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, UMKM juga berkontribusi dalam pengembangan ekonomi lokal dan penguatan kesejahteraan masyarakat.⁶ Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, usaha mikro didefinisikan sebagai usaha yang memiliki aset maksimal Rp50 juta dan omzet tahunan tidak lebih dari Rp300 juta. Desa Mattanete Bua, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone merupakan daerah dengan angka kemiskinan tinggi, mencapai 25,7% pada tahun 2021.⁷ Kemiskinan ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perempuan - perempuan yang ada di desa ini untuk mencari penghasilan tambahan melalui Usaha Mikro. Kesempatan kerja formal di desa ini sangat terbatas. Hal ini membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Usaha Mikro menjadi alternatif bagi mereka untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.⁸

Kabupaten Bangkalan terletak di ujung barat pulau Madura yang memiliki garis pantai yang cukup luas. Dengan adanya hal tersebut menjadikan daerah Bangkalan memiliki banyak tambak. Ada yang berupa tambak ikan, tambak udang dan sebagainya. Hal ini dibuktikan dengan sebagian masyarakatnya juga berprofesi sebagai nelayan ataupun pembudidaya ikan.⁹

Di beberapa desa di Bangkalan, Madura, juga terdapat potensi besar dalam pengolahan hasil laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat.

⁴ Diaz, Rendy, Novia,. (2019). Peran Pemerintah Desa terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam Pertumbuhan Ekonomi Lokal pada Industri Batu Bata (Studi Kasus Desa Ujanmas Baru Kec. Ujanmas Kabupaten Muara Enim). *Jurnal Pemerintahan dan Politik Global*, 04(02), 75–81

⁵ Maharani, Wardani, Fachira, & M. Agus Muljanto. (2024). Peran Penguatan Oleh Pemerintah Desa dalam Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Desa Banjarsari Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(2), 533–547.

⁶ Dharma, (2024). Pemberdayaan Usaha Mikro Perempuan: Peran Kunci Literasi Risiko Berbasis Syariah. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 115–128.

⁷ Marhayani, (2019). Peran Usaha Mikro Kecil Menengah di Kalangan Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus pada Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo). *Institut Agama Islam Negeri Palopo* 50-70.

⁸ Agustin, (2021). Manajemen Keuangan Syariah. *Rajawali Pers*. Arfiani, (2020). *Berantas Kemiskinan*. Alpin. 200-250.

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan. (2020). *Statistik Kabupaten Bangkalan 2020*. BPS Kabupaten Bangkalan 100-150

Salah satu produk unggulan adalah sambal udang rebon yang berasal dari Desa Pernajuh. Udang rebon sendiri merupakan jenis udang kecil yang banyak ditemukan di perairan sekitar Madura dan dikenal memiliki cita rasa khas yang sangat digemari.¹⁰

Selain sambal udang rebon, terdapat juga berbagai produk perikanan lain yang diolah oleh UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), seperti UMKM Sumber Laut yang berlokasi di Desa Junganyar, Kecamatan Socah. UMKM ini mengelola hasil laut menjadi produk olahan yang beragam, mulai dari kerupuk udang, kerupuk terung, kerupuk layur, kerupuk jarot, kerupuk blonyok, hingga produk olahan lainnya yang memiliki nilai jual tinggi dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lokal.¹¹

Usaha pengolahan hasil laut ini telah berdiri sejak tahun 2008 dan terus berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan pasar, baik lokal maupun luar daerah. Keberadaan UMKM ini tidak hanya memberikan nilai tambah pada hasil laut, tetapi juga membuka lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat desa.¹²

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Nurjannah pada tahun 2015 dengan judul “Dampak peran ganda perempuan dalam sektor kerajinan kulit di Dusun Manding mendapati hasil bahwa dampak peran ganda perempuan menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif diperlihatkan dengan adanya peningkatan ekonomi keluarga, sedangkan dampak negatif diperlihatkan dengan waktu untuk keluarga mencari berkurang serta ketidakhadiran perempuan dalam kegiatan sosial masyarakat.¹³

Penelitian lain juga dilakukan oleh Sukamto pada tahun 2014 dengan judul “kontribusi (sumbangan) pekerja perempuan terhadap pembentukan pendapatan keluarga” memperoleh hasil dimana kontribusi pendapatan pekerja perempuan terhadap pendapatan keluarga sebesar 35.91%. Studi lain dilakukan oleh Syaifuddin Zuhdi pada tahun 2018 mengenai peran ganda perempuan dalam masyarakat industri menemukan hasil bahwa adanya peran ganda perempuan merupakan pergeseran peran domestik perempuan dari ibu rumah tangga ke partisipasi perempuan dalam peran ekonomis, sehingga menjadi masyarakat industri yang berbasis pada money oriented, 2 Jurnal Wedana partisipasi tersebut berakibat pada kondisi keluarga maupun hubungan sosial masyarakat, apabila mereka dapat mensikapi dan mengatasi permasalahan yang muncul dengan baik maka efek dari partisipasi kerja tersebut menjadi baik.¹⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dan didasarkan beberapa penelitian yang penulis cantumkan, maka penelitian ini berusaha untuk

¹⁰ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2019). Pengembangan UMKM Perikanan di Wilayah Pesisir. Jakarta: KKP RI. 80-120.

¹¹ Pemerintah Kabupaten Bangkalan. (2021). Profil UMKM Sumber Laut Desa Junganyar. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bangkalan 20-40.

¹² Pemerintah Kabupaten Bangkalan. (2021). Profil UMKM Sumber Laut Desa Junganyar. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bangkalan 20-40.

¹³ Nurjannah, Nurjannah (2015) Dampak Peran Ganda Pekerja Perempuan Terhadap Keluarga dan Kegiatan Sosisl di (Studi Terhadap Pekerja Perempuan pada Industri Rumah Tangga. 60-80.

¹⁴ Sukamto, (2014). Kontribusi Pekerja Perempuan Terhadap Pembentukan Pendapatan Keluarga. Jurnal ekonomi Terapan, 5(2). 45-48.

menganalisis dan menjelaskan lebih lanjut mengenai “Strategi Pemerintahan Desa dalam Peningkatan Peran Perempuan Melalui Usaha Mikro: Tinjauan dalam Perspektif Maqashid Syariah” yang mana belum dijelaskan dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan menjelaskan dan menganalisis sejauh mana pemerintahan desa dalam peningkatan peran perempuan melalui usaha mikro. Dari temuan hasil nanti juga akan mengkaji pemerintahan desa dalam meningkatkan peran perempuan melalui usaha mikro dan ekonomi desa dalam perspektif maqashid syariah, Diharapkan penelitian ini nantinya dapat menambah referensi baru dalam persoalan strategi pemerintahan desa dalam peningkatan peran perempuan melalui usaha mikro dan ekonomi desa tinjauan perspektif maqashid syariah.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pemerintahan desa dalam peningkatan peran perempuan melalui usaha mikro dan ekonomi desa junganyar?
2. Bagaimana tinjauan perspektif maqashid syariah terhadap strategi pemerintahan desa junganyar dalam meningkatkan peran perempuan melalui usaha mikro?

1.3. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Menganalisis strategi pemerintahan desa junganyar dalam meningkatkan peran perempuan melalui usaha mikro dan ekonomi desa
2. Menganalisis strategi pemerintahan desa junganyar dalam meningkatkan peran perempuan melalui usaha mikro berdasarkan prinsip maqashid syariah

1.4. Tabel Luaran

Indikator ini menunjukkan komponen-komponen utama yang diperlukan dalam proses penelitian, mencakup dokumentasi kemajuan, hasil akhir, pencatatan kegiatan, publikasi ilmiah, presentasi visual, dan sintesis hasil. Semua indikator telah dicentang, menandakan kelengkapan dalam konteks penelitian yang bersangkutan. Mencantumkan enam indikator penelitian yang semuanya ditandai sebagai terpenuhi (√). Indikator-indikator tersebut adalah:

Tabel 1. 1. Indikator Penelitian

NO	Jenis	Indikator
1	Laporan Kemajuan Penelitian	√
2	Laporan Akhir Penelitian	√
3	Log Book kegiatan penelitian	√
4	Konferensi Internasional/Prosiding Internasional	√
5	Poster	√
6	Rangkuman hasil penelitian	√

Sumber: Panduan MBKM Riset FKis

1.5 Jadwal Penelitian

Tabel ini menunjukkan jadwal penelitian yang mencakup periode dari bulan 7 hingga bulan 12 (kemungkinan bulan Juli hingga Desember dalam kalender akademik atau proyek). Kegiatan-kegiatan utama yang tercantum adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2. Jadwal Penelitian

Kegiatan	Bulan					
	7	8	9	10	11	12
Seleksi MBKM Riset						
SK MBKM Riset						
Seminar Proposal						
Seminar Kemajuan						
Seminar Akhir						

Sumber: Panduan MBKM Riset FKis